

RETORIKA KAMPANYE JOKO WIDODO DALAM PILPRES 9 JULI 2014 (SEBUAH KAJIAN AKSILOGI FILSAFAT BAHASA)

Ni Made Rai Wisudariani

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Ganesha
Jalan Jend. A Yani 67 Singaraja 81116, Telp. 0362-21541, Fax. 0362-27561
Email: rai.wisudariani@pasca.undiksha.ac.id

ABSTRACT

Political rhetoric tends to have certain political motives and goals. These political goals are under the study of the axiological domain of language philosophy. Related to the phenomenon of democracy in Indonesia, Joko Widodo as one of the president candidates owned a strategy of political rhetoric. The results of the study on the political rhetoric of the speech delivered by Jokowi in Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai [Declaration of Honest and Peaceful Presidential Election] on June 3, 2014 suggested that from axiological point of view, Jokowi's speech led to public image creation, formation of general opinion, and persuasive-participant politics.

Key words: political rhetoric, axiology

PENDAHULUAN

Segala sesuatu yang kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari, baik berdimensi pribadi, sosial maupun ke-Tuhanan tentulah mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Baju kotak-kotak yang sering digunakan oleh Jokowi dan menjadi *trend center*-nya sejak mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jakarta pada tahun 2012 dianggap memiliki makna khusus sebagai simbol rakyat kecil dengan berbagai keragaman adat dan budaya. Begitu pula trend baju putih lengan panjang yang dilipat oleh calon wakil presiden Yusuf Kalla di simbulkan dengan perangai buruh yang siap untuk bekerja.

Setiap hal yang dilakukan oleh politisi maupun aktivis memiliki makna dan maksud tertentu. Demikian pula halnya dengan para politisi yang melakukan praktek-praktek komunikasi politik. Tandjung (dalam Arifin, 2011:vii) menyatakan bahwa komunikasi politik mempunyai arti yang sangat penting terutama pada era reformasi sekarang ini. Iklim keterbukaan dan

demokratisasi yang dibangun baik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung akan semakin menambah pentingnya arti komunikasi politik di Indonesia.

Salah satu bentuk dari komunikasi politik adalah retorika dalam pidato. Retorika dalam pidato menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komunikasi politik. Hakikat retorika dalam pidato itu sendiri adalah upaya kelompok manusia yang memiliki orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menyampaikan pesan, ide (butir pikiran), isi hati atau perasaan, rencana sebuah program kepada khalayak pendengar. Komunikasi politik melalui pidato menjadi sebuah sarana efektif bila masing-masing kandidat bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan menggunakan retorika yang baik pula.

Komunikasi politik melalui pidato cenderung memiliki motif atau tujuan-tujuan politik tertentu. Berbicara tentang motif dan tujuan yang ada dalam sebuah teks pidato, sesungguhnya kita telah berbicara mengenai aspek aksiologi. Aksiologi adalah nama lain dari filsafat nilai dan ter-

masuk cabang dari etika. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan atau manfaat dari sesuatu. Aspek aksiologi dalam tataran analisis pidato dibatasi sebagai konsep ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari penyampaian sebuah pidato dalam komunikasi politik.

Dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2014, ada dua capres dan cawapres yang berkompetisi merebut hati rakyat (pemilih). Kedua calon ini tentu saja memiliki motif dan tujuan tertentu yang disampaikan dalam pidatonya. Salah satu pidato yang berdurasi kurang lebih tiga menit yang menarik untuk dikaji adalah pidato yang disampaikan oleh Jokowi dalam acara Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Bidakara, Jakarta Selatan. Acara ini dihelat sebelum masa kampanye yang dimulai pada tanggal 4 Juni 2014 hingga tanggal 5 Juli 2014. Sosok Jokowi yang fenomenal yang ditampilkan dalam isi pidato, sangat menarik untuk dikaji dari aspek aksiologi.

METODE PENGKAJIAN

Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang dikaji sehingga dapat ditemukan letak kebermaknaan (aksiologi) yang tersembunyi di balik teks pidato yang disampaikan oleh Joko Widodo.

Yang menjadi objek dalam tulisan ini adalah teks pidato Jokowi dalam Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai (Pada tanggal 3 Juni 2014). Sumber data kajian ini diperoleh dari rekaman pidato Joko Widodo dalam Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai (pada tanggal 3 Juni 2014) di Youtube. Rekaman ini kemudian penulis transkrip menjadi teks tertulis.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data dari rekaman berupa video se-

waktu calon presiden Joko Widodo berpidato dalam Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai (Pada tanggal 3 Juni 2014). Rekaman ini kemudian ditranskrip menjadi teks tertulis. Selanjutnya dilakukan metode observasi melalui panduan pengamatan. Adapun prosedur analisisnya, sebagai berikut, (1) data visualisasi rekaman pidato ditranskrip dan dijadikan teks tertulis; (2) data yang sudah menjadi teks, kemudian diidentifikasi dasar pemilihan kata-katanya; (3) berdasarkan hasil identifikasi, dianalisis unsur aksiologisnya dan dihubungkan ke dalam konteks situasi yang sedang terjadi, (4) hasil dari analisis (1), (2), dan (3), kemudian dideskripsikan untuk menemukan jawaban aksiologi retorika pidato Jokowi dalam Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai (Pada tanggal 3 Juni 2014).

PEMBAHASAN

Pidato Joko Widodo dalam Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai Transkrip pidato Joko Widodo ini diperoleh dalam Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai pada tanggal 3 Juni 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Bidakara, Jakarta Selatan. Deklarasi ini dihadiri oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selain itu, turut hadir pula Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan pemerintah. Dalam acara ini setiap calon presiden diminta untuk berpidato kurang lebih selama 3 menit. Berikut dipaparkan transkrip pidato Joko Widodo dalam acara ini. (Mengucapkan salam umat muslim, dan salam shalawat nabi)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal-mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma in ama ba'du.

Selamat malam dan Yang saya hormati Bapak Ketua KPU, Bapak Ketua Bawaslu beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati seluruh pimpinan Lembaga Tinggi negara, Ibu dan Bapak sekalian, hadirin yang berbahagia.

Kita ingin pilpres pemilu presiden 9 Juli yang akan datang diiringi dengan sebuah pemilihan yang bermartabat, sebuah pemilihan yang berintegritas tanpa adanya kecurangan, tanpa adanya kampanye hitam, tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya intimidasi. Pilpres harus kita tunjukkan sebagai suatu kegembiraan politik, kegembiraan politik bukan sebuah ketakutan.

Ada dua hal, dua tahapan yang akan kita lalui yaitu tanggal 4 Juni sampai tanggal 5 Juli yaitu proses kampanye. Dan kita berharap agar didalam kampanye ini semuanya merasa gembira karena demokrasi yang akan kita jalankan adalah sebuah demokrasi yang mensejahterakan bukan sebuah demokrasi yang mencelakakan.

Kedua, kedua, tanggal 9 Juli nanti kita akan melakukan pencoblosan. Ada dua calon, ada dua calon. Calon presiden, dua calon presiden dan dua calon wakil presiden. Semuanya kita serahkan kepada rakyat karena yang berdaulat adalah rakyat. Siapa yang dikehendaki oleh rakyat kami berdua Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla menghargai semua apa yang dikendaki oleh rakyat.

Terima kasih. *Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ...*

Analisis Fungsi Aspek Aksiologi Pidato Joko Widodo

Memperhatikan isi dari pidato yang disampaikan oleh Joko Widodo, ada semacam karakter dari Joko Widodo yang ingin menyampaikan pesan dengan cara Joko Widodo. Berikut penulis paparkan analisis unsur aksiologi pidato Joko Widodo dalam Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai pada tanggal 3 Juni 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Bidakara, Jakarta Selatan.

Mengawali pidatonya, Joko Widodo mengucapkan salam umat muslim, dan salam shalawat nabi.

“Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh, Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal-mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma in ama ba’du”.

Apa yang disampaikan oleh Joko Widodo itu artinya 'segala puji bagi Allah Sang Penguasa alam semesta. Semoga salawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul mulia. Beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya,

semuanya'. Joko Widodo tidak menyisipkan salam dari agama lain karena Joko Widodo ingin mendekonstruksi bangunan nasionalisme yang terlanjur pekat di dalam dirinya. Simbolisme Joko Widodo sebagai sosok yang tidak jelas agamanya, seperti yang selama ini dikampanyehitamkan oleh lawan-lawan politiknya, ternyata memiliki wajah lain. Apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini merupakan sebuah sinyal untuk menepis kampanye hitam yang menyerang dirinya akhir-akhir ini. Joko Widodo ingin meyakinkan masyarakat akan identitas keyakinannya.

Bagi kelompok pendukung Joko Widodo, tentu paham bahwa salam yang disampaikan oleh Joko Widodo merupakan strategi yang sifatnya artifisial. “Salam santri” merupakan komunikasi konotatif yang menjadi pesan dalam tataran level kedua, untuk menandingi pesan negatif yang dialamatkan kepada Joko Widodo. Bagi masyarakat awam, salam itu menjadi tanda baru, representasi kesalehan agama Islam sekaligus mendekonstruksi citra buruk yang terlanjur diberikan kepada Joko Widodo.

Setelah mengucapkan salam umat muslim, dan salam shalawat nabi, Joko Widodo melanjutkan dengan memberikan salam kepada Bapak Ketua KPU, Bapak Ketua Bawaslu beserta seluruh jajarannya, seluruh pimpinan Lembaga Tinggi negara, Ibu dan Bapak sekalian, dan kepada hadirin yang berbahagia. Dalam ucapan salam kepada pihak-pihak terkait ini, Joko Widodo sengaja mengabaikan etika berpidato seperti tidak adanya penyebutan detail nama satu per satu para undangan dan penyebutan detail kompetitornya menuju RI 1. Nampaknya Joko Widodo ingin menyampaikan sebuah pidato dengan penjabaran yang sederhana dan melepaskan diri dari hal-hal yang menurut Joko Widodo menjadi kurang luwes. Joko Widodo membuat stigma baru dalam berpidato yang kurang lazim bagi beberapa orang. Dilihat dari latar belakang Joko Widodo yang orang Jawa, menurut penulis Joko Widodo ingin menghindari dan terilhami karakter-karakter dalam tokoh pewayangan yang dikenalkan se-

jak kecil oleh kakek Joko Widodo, yang memang mencintai wayang.

Pidato Joko Widodo yang tidak menyebut tamu undangan secara detail merupakan perlambatan Bima di dalam dirinya untuk membenamkan kebiasaan Sangkuni yang cenderung pandai bicara dan mengambil hati kepada para undangan yang hadir. Joko Widodo ingin menyampaikan kejujuran dan keteguhan hatinya untuk memberikan kesederhanaan yang apa adanya tidak berbalut senyum manis dan tutur kata yang bertele-tele dan sedikit merayu. Dengan menyebut bapak ibu dan hadirin sekalian merupakan keteguhan Bima di dalam hatinya bahwa masyarakat Indonesia itu adalah punya hak yang sama dan sejajar. Sehingga yang hadir di tempat itu semuanya adalah “orang penting”.

Setelah penyampaian salam, Joko Widodo menyampaikan isi pidato yang cukup panjang. Berbeda dengan pidato-pidato sebelumnya yang pendek. Pembukaan isi pidato Joko Widodo dimulai dengan paparan tentang keinginan Joko Widodo dan masyarakat pendukung terkait pemilihan yang bermartabat, sebuah pemilihan yang berintegritas tanpa adanya kecurangan, tanpa adanya kampanye hitam, tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya intimidasi. Joko Widodo juga menekankan bahwa pilpres harus kita tunjukkan sebagai suatu kegembiraan politik, kegembiraan politik bukan sebuah ketakutan.

Isi pidato Joko Widodo yang menyebutkan bahwa pemilu harus bermartabat, tanpa kecurangan tampaknya merupakan sebuah sindiran kepada semua pihak karena pemilu seperti yang didambakan Joko Widodo tidak berjalan di lapangan dengan baik. Banyak kampanye hitam yang dihembuskan dan disudutkan kepada Joko Widodo seperti Joko Widodo capres boneka dari Megawati, Joko Widodo merupakan keturunan Tionghoa dan agama Kristen, bukan beragama Islam, Joko Widodo juga diisukan sebagai keturunan Cina yang bernama Wie Jo Koh. Sedangkan untuk isu agama, Joko Widodo sempat diberitakan memiliki nama lengkap Heribertus Joko Widodo. Tidak hanya diserang melalui isu SARA, Joko

Widodo juga diserang dengan isu buku nikah palsu. Ini semua merupakan sebuah bentuk kecurangan, dan kurangnya integritas dari pemilu yang bermartabat yang terjadi di lapangan.

Kekerasan dan intimidasi juga kerap dialami oleh seluruh tim pendukung Joko Widodo-JK. Tindak kekerasan berupa perusakan rumah, sepeda motor, hingga berbagai bentuk intimidasi lainnya yang menimpa para pendukung Joko Widodo-JK seperti yang terjadi di Yogyakarta. Joko Widodo juga menekankan bahwa semua pihak harus menghilangkan segala bentuk nafsu angkara murka hanya untuk berkuasa. Bagaimanapun juga pemilu presiden merupakan sebuah harapan untuk perubahan negeri yang lebih baik. Rakyat diberi kemerdekaan sepenuhnya untuk ikut menentukan pemimpin yang merakyat dan memiliki jejak bersih, untuk Indonesia yang lebih rukun dan damai, Jika semua bentuk pelanggaran ini segera disikapi maka masyarakat akan dapat merasakan sebuah kegembiraan politik.

Isi pidato Joko Widodo ini juga menyiratkan bahwa pemenang pilpres adalah mereka yang memiliki keyakinan Indonesia memerlukan pemimpin yang rela berkorban, memiliki kebesaran jiwa, dan tidak pernah menyerang pihak lain. Ada keyakinan pula bahwa intimidasi tidak akan menyurutkan langkah pendukung Joko Widodo untuk memilih pemimpin yang memang terlahir dari rakyat. Joko Widodo juga berharap agar semua pihak selalu waspada dan bekerjasama dengan baik, mengingat sudah terjadi berbagai aksi dan tindakan yang sangat tidak terpuji belakangan ini, yang merusak dan mencoreng komitmen membangun demokrasi yang berkualitas, menciptakan pemilu damai, seperti kampanye hitam yang memfitnah dan menjelek-jelekkan calon presiden, yang berpotensi menimbulkan konflik horisontal. Berbagai kecemasan akan memuncaknya konflik dapat dipahami jika semua pihak tidak mengantisipasinya. Sekecil apapun potensi tersebut harus dicegah, untuk itu semua pihak khususnya stakeholder pemilu agar konsisten dan tegas serta adil menyikapi berbagai peristiwa-peristiwa tersebut.

Selanjutnya dalam isi pidato yang disampaikan oleh Joko Widodo, Joko Widodo juga memaparkan tentang ihwal dari pemilihan umum. Joko Widodo mengatakan

“Ada dua hal, dua tahapan yang akan kita lalui yaitu tanggal 4 Juni sampai tanggal 5 Juli yaitu proses kampanye. Dan kita berharap agar di dalam kampanye ini semuanya merasa gembira karena demokrasi yang akan kita jalankan adalah sebuah demokrasi yang mensejahterakan bukan sebuah demokrasi yang mencelakakan”.

Menurut penulis, pada bagian ini Joko Widodo sebenarnya menghimbau dan mengajak masyarakat pendukung Joko Widodo maupun pendukung rival Joko Widodo untuk kembali kepada hakikat pemilihan umum. Terciptanya pemilu yang damai, sebenarnya merupakan bagian dan wujud nyata karakter bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dan dasar pijakan masyarakat dalam bermasyarakat sehari-hari serta diperkuat dengan nafas Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda kita tetap satu, bangsa Indonesia, maka sudah seharusnya segenap masyarakat Indonesia menghayati dan melaksanakan pesta demokrasi ini dengan berbagai aktivitas dan tindakan yang damai, santun dan bertitik tolak untuk kesejahteraan masyarakat secara jasmani dan rohani.

Sebagai negara dan bangsa yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika, maka tanggung jawab kita bersama, baik masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk merealisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika demi terwujudnya Indonesia yang damai. Komisi Pemilihan Umum harus benar-benar menjaga netralitasnya, juga dengan semua pihak penyelenggara pemilu sampai kabupaten, kecamatan dan desa, harus benar-benar menjaga netralitas dan independennya, jangan ada upaya untuk memihak salah satu pihak, karena upaya pemihakan akan mencederai tujuan akhir dari pemilu ini.

Pihak media, sebagai pilar demokrasi lainnya, memiliki peran yang sangat vital men-

ciptakan pemilu damai dan menciptakan kedamaian di masyarakat. Media harus cerdas dalam menayangkan berita-berita ke masyarakat. Harus memilah mana berita yang layak konsumsi mana berita yang tidak layak, jangan hanya gara-gara kejar rating dan keberpihakannya, maka semua berita-berita diturunkan yang ujungnya akan menciptakan ketidakstabilan situasi politik di masyarakat. Aparat pemerintah, baik sipil maupun militer juga harus benar-benar netral, sebagai abdi negara. Sistem birokrasi harus netral, jangan menggunakan kekuatan sistem tersebut untuk memihak salah satu kandidat karena akan merusak upaya menciptakan pemilu damai.

Dalam penggalan isi pidato tersebut, Joko Widodo memberikan penekanan kata dua dengan cara mengulang-ulang kata dua. Dalam penekanan dan pengulangan kata dua ini, Joko Widodo bermaksud agar masyarakat mulai dekat dan familiar dengan angka dua yang menjadi nomor urut Joko Widodo dalam pilpres ini. Dalam isi pidato yang terakhir Joko Widodo mengatakan

“Kedua, kedua, tanggal 9 Juli nanti kita akan melakukan pencoblosan. Ada dua calon, ada dua calon. Calon presiden, dua calon presiden dan dua calon wakil presiden. Semuanya kita serahkan kepada rakyat karena yang berdaulat ada lah rakyat. Siapa yang dikehendaki oleh rakyat kami berdua Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla menghargai semua apa yang dikendaki oleh rakyat. Terima kasih. *Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ...*”

Dalam isi pidato ini, Joko Widodo tampak memberikan “jokes” yakni mengucap dan mengulang-ulang kata “dua” beberapa kali. Joko Widodo menyelipkan kata dua berkali-kali, seperti ada dua tahapan, kedua, kedua, dua capres, dua cawapres. Menurut penulis, Joko Widodo mulai mengkampanyekan nomor urut 2 yang diperolehnya. Seperti dalam pidato pendek sebelumnya tentang ihwal nomor dua, dengan cerdas Joko Widodo bisa mendekonstruksi simbolisme wicara tentang nomor “dua” yang diretensi melalui bentuk pengulangan. Tujuannya adalah masyarakat lebih dekat dengan istilah dua.

Dalam pidato sebelumnya, istilah dua yang disampaikan Joko Widodo melahirkan signifikansi baru sebagai tanda keseimbangan, seperti dua mata, dua telinga, dan dua tangan. Joko Widodo juga menyisipkan visualisasi angka dua jika diacungkan dengan jari sehingga membentuk huruf “V” atau victory: yakni tanda kemenangan yang berumur setua sejarah Romawi. Dalam pidato ini, Joko Widodo juga ingin mempopulerkan angka 2 yang bukan berarti selalu berada setelah angka 1. Dalam pidato ini, Joko Widodo berhasil membangun pemaknaan baru, terutama pada “filsafat nomor dua” dan memberikan keluasaan penonton untuk menikmati sebuah hiburan ringan dengan bahasa Joko Widodo yang sederhana, dan denotatif.

Akhirnya pada beberapa kalimat terakhir sebelum menutup pidato, Joko Widodo menyampaikan bahwa apapun hasil dan siapapun yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan presiden ini, Joko Widodo dan wakilnya, Muhammad Jusuf Kalla menghargai semua yang dikendaki oleh rakyat. Kalimat terakhir ini menjadi cerminan karakter nasionalisme dan kenegarawanan Joko Widodo dan wakilnya yang menghormati (*respect*) kepada kedaulatan rakyat. Joko Widodo dan wakilnya sanggup menerima semua hasil keputusan yang diberikan oleh rakyat dalam pemilu nanti. Sosok Jawa, Joko Widodo yang ‘nerimo’ terpancar dalam kalimat terakhir Joko Widodo.

PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik beberapa simpulan dalam kajian ini sebagai berikut. Bentuk teks pidato Joko Widodo terdiri atas beberapa bagian yang meliputi salam pembuka pidato, isi pidato, dan salam penutup. Salam dibuka dengan mengucapkan salam umat muslim dan salam shalawat nabi, kemudian menyampaikan salam kepada Bapak Ketua KPU, Bapak Ketua Bawaslu beserta seluruh jajarannya, seluruh pimpinan Lembaga Tinggi negara, Ibu dan Bapak sekalian, hadirin yang berbahagia. Isi pidato Joko

Widodo memaparkan tentang pemilihan presiden yang bermartabat, berintegritas, tanpa adanya kampanye hitam, tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya intimidasi dan menjadikan pilpres sebuah kegembiraan politik. Pada bagian akhir pidato, Joko Widodo menyampaikan kesediaannya untuk menghormati segala hasil dalam pilpres ini. Pidatonya ini kemudian ditutup dengan menyampaikan salam umat muslim.

Secara aksiologi retorika pidato yang ditampilkan oleh Joko Widodo mengarah pada pencitraan publik dan persuasif partisipan politik. Citra publik dibentuk oleh Joko Widodo dengan mengucapkan salam umat muslim, salam shalawat nabi dan tidak menyisipkan salam dari agama lain. Hal ini dilakukan oleh Joko Widodo untuk menepis isu kampanye hitam dan menyakinkan masyarakat akan identitas keyakinannya. Selain pencitraan, dalam ucapan salam kepada pihak-pihak terkait, Joko Widodo sengaja mengabaikan etika berpidato seperti tidak adanya penyebutan detail nama satu per satu para undangan dan penyebutan detail kompetitornya menuju RI 1. Hal ini dimungkinkan karena Joko Widodo ingin membuat stigma baru (pembentukan pendapat) dalam berpidato yang membenamkan kebiasaan Sangkuni (tokoh pewayangan) yang cenderung pandai bicara dan mengambil hati kepada para undangan yang hadir. Joko Widodo ingin menyampaikan kejujuran dan keteguhan hatinya untuk memberikan kesederhanaan yang apa adanya tidak berbalut senyum manis maupun tutur kata yang bertele-tele seperti perwujudan Bima dalam tokoh pewayangan. Joko Widodo ingin menekankan bahwa semua yang hadir di tempat itu adalah “orang penting”. Isi pidato Joko Widodo yang menyebutkan bahwa pemilu harus bermartabat, tanpa kecurangan tampaknya merupakan sebuah sindiran kepada semua pihak karena pemilu seperti yang didambakan Joko Widodo tidak berjalan di lapangan dengan baik. Sedangkan, paparan Joko Widodo tentang ihwal dari pemilihan umum sebagai politik yang menggembirakan merupakan pembentukan persepsi masyarakat agar berani ikut berpartisipasi dalam pemilu, walau-

pun rival Joko Widodo adalah dari kalangan militer. Selain itu, secara persuasif, Joko Widodo meretensi “angka dua” yang dilakukan secara terus-menerus dengan maksud agar komunikan dalam hal ini masyarakat melakukan imitasi terhadap jargon “dua” yang berkali-kali diucapkan tersebut, sehingga tanpa disadari masyarakat sudah menjadi bagian dari agen propagandis nomor 2 yang menjadi nomor urut Joko Widodo dalam pilpres.

Tulisan ini masih terbatas pada pembahasan tentang unsur aksiologi retorika pidato Joko Widodo, pada pengkajian selanjutnya peneliti lain diharapkan mengkaji aspek aksiologi dari pidato Prabowo Subianto agar jelas perbedaan corak retorika yang digunakan oleh kedua pasangan calon presiden ini. Bagi praktisi bahasa, kajian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis pilihan kata dalam penyusunan pidato maupun komunikasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Cangara, Hafied. (2011). *Komunikasi Politik: Konsep Teori dan Strategi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- McNair, Brian. 2003. *Introduction to Political Communication*. London: Routledge.
- Nimmo, D. (1978). *Political Communication and Public Opinion in America*. California: Good Year
- Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoretis*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Sumarno. (1989). *Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik*. Bandung: Citra Ditya Bakti.